

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pemerintah Korea Selatan telah mengambil langkah-langkah yang signifikan dalam melindungi pengungsi Korea Utara, termasuk melalui pembentukan undang-undang perlindungan dan dukungan penyelesaian bagi pengungsi, seperti Undang-undang *North Korean Refugees Protection and Settlement Support Act*. Program *Hanawon Resettlement* juga merupakan inisiatif penting yang memberikan dukungan, pelatihan, dan informasi kepada pengungsi untuk membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan di Korea Selatan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, termasuk diskriminasi, stigma negatif, dan kesulitan dalam integrasi ke dalam masyarakat Korea Selatan. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya untuk melindungi pengungsi, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan keberhasilan integrasi Pengungsi Korea Utara ke dalam masyarakat Korea Selatan.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan di atas, maka Pemerintah Korea Selatan dapat:

1. Pentingnya perhatian pemerintah Korea Selatan terhadap perubahan sikap masyarakat Korea Selatan terhadap pengungsi Korea Utara adalah bahwa langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi diskriminasi perlu segera diambil. Melalui program pendidikan dan kampanye kesadaran, pemerintah dapat memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi oleh pengungsi Korea Utara, sehingga dapat mengurangi stigma dan meningkatkan penerimaan mereka.
2. Penguatan kerjasama antara pemerintah Korea Selatan, organisasi non-pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat juga merupakan langkah penting. Dukungan tambahan seperti program bantuan sosial, dukungan psikologis, dan pelatihan keterampilan dapat membantu pengungsi Korea Utara dalam proses integrasi ke dalam masyarakat Korea Selatan. Dengan bekerjasama, pemerintah dan pihak terkait dapat meningkatkan implementasi program Hanawon, sehingga pengungsi Korea Utara dapat lebih mudah mengatasi tantangan integrasi dan menghindari diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Romsan, dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Sanic Offset, Bandung.
- Ahmad Syofyan, 2022, *Hukum Internasional*, Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, Lampung.
- Azhar dan Abdul Halim, 2020, *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan*, Unsri Press, Palembang.
- Fithriatus Shalihah dan Muhammad Nur, 2021, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, UAD Press, Yogyakarta.
- Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, 2017, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi Dalam Negeri)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Mesia, Pasuruan.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muh Risnain, 2020, *Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*, Sanabil, Mataram.
- Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.
- Wagiman, 2021, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasil Penelitian

- Christine Debora, 2019, *Kebijakan Donald Trump Mengenai Penutupan Akses Masuk Pengungsi Yang Berasal Dari Timur Tengah Ditinjau Dari Pasal 33 Ayat (1) Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Dian Maharani Junita, 2021, *Sikap Negara Pihak Yang Menolak Pengungsi Timur Tengah Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1951 Dan Protokol New York*

1967 (*Studi Kasus: Penolakan Pengungsi Timur Tengah Oleh Belanda Dan Amerika Serikat*), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

F Amirudin, 2016, *Tinjauan Pustaka Tentang Pengungsi, Perang, UNHCR dan Konvensi Wina 1951*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Kadek Raos Amerta Agustina, 2019, *Kebijakan Amerika Serikat Mengenai Penolakan Pengungsi Dari Negara Tertentu Ditinjau Dari Prinsip Non Diskriminasi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Siti Rizki Ananda, 2019, *Pembelotan Masyarakat Korea Utara ke Korea Selatan dibawah Masa Kepimpinan Kim Jong Un tahun 2011-2018*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Jurnal

Daniel J. Schwekendiek & Seung Ju Lee, 2018, "The People Who Left then People's Republic: A History of the North Korean Diaspora", *Association for Asian Studies*, Vol. 23 Nomor. 2 Desember 2018, Education About Asia.

Emma Poorman, 2019, "North Korean Defectors in South Korea and Asylum Seekers in the United States: A Comparison", *Northwestern Journal of Human Rights*, VolXVII/No-01/April/ 2019, NorthwesternLaw.

Eschborn, Norbert, and Ines Apel, 2014, "North Korean Refugees in South Korea: Ardous Escape and Difficult Integration", *Army and Society*, pp. 59-84, Konrad Adenauer Stiftung, Bonn.

Fitriani, 2013, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengungsi (Refugee) Dalam Hukum Internasional", *Legal Opinion*, Vol 1, No. 6, Universitas Tadulako.

Gyubin Choi, 2018, "North Korean Refugees in South Korea: Change dan Challenge in Settlement Support Policy", *The Korean Journal International Studies*, Vol.16, No.1, The Korean Journal International Studies.

Lintje Anna Marpaung, 2015, "Analisis Yuridis Normatif Perbandingan Prosedur Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatannya Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Korea Selatan", *Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM*, Vol. 10, Nomor. 2 Juli 2015, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Sung Jung-Hyun, 2014, "North-Korean-Refugee Women's Experience of Discrimination in South Korea and Reemergence of Trauma Experience", *The Journal of the Korea Contents Association*, Vol.14 No. 5, The Korea Contents Association.

Vinesha Anindita, 2020, "Gelombang Pengungsi Korea Utara di Korea Selatan: Politik Domestik, Integrasi, dan Permasalahan Sosial", *Jurnal Hubungan International*, Tahun XIII, No. 2, Universitas Airlangga.

Internet

Ash Abraham, 2019, Life after Hanawon. <https://cusjc.ca/mrp/strainedrelations/life-after-hanawon/> , diakses 10 Agustus 2023.

Bayu Subiantoro, 2019, Pemerintahan Nasional Korea Utara. <https://www.studocu.com/id/document/universitas-muhammadiyah-mataram/ilmu-pemerintahan/pemerintahan-nasional-korea-utara/46331880?origin=organic-success-document-viewer-cta> , diakses 28 September 2023.

CNN Indonesia, 2022, Penyebab Pembelot dari Korut Tetap Hidup Susah di Korsel. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220111122531-113-> _diakses 23 Mei 2023.

Ministry of Unification, 2018, Settlement Support for North Korean Defectors. https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/whatwedo/support/, _diakses 21 Mei 2023.

Marcus Noland, 2017, Korean Preparation For National Unification. <https://www.piiie.com/commentary/testimonies/korean-preparation-national-unification>, diakses 11 Desember 2023.

Peraturan Hukum

1993 Defected Ethnic North Korean Protection Law

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi

North Korean Refugees Protection and Settlement Support Act

Organization of African Unity (OAU) Convention

Protokol New York Tahun 1967 tentang Status Pengungsi

Statuta United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Universal Declaration of Human Rights 1948



LAMPIRAN

VERBATIM WAWANCARA

Biodata Narasumber

Nama : Suray Agung Nugroho, S.S., M.A., Ph.D.
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Prodi Bahasa dan Kebudayaan
Korea Universitas Gadjah Mada
Hari/Tanggal Wawancara : 10 November 2023

Hasil Wawancara

Pelaku	Uraian Wawancara
Peneliti	Selamat Siang, Pak. Perkenalkan saya Faris Adianto dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang datang kesini untuk meminta bapak dalam rangka menyempurnakan data penelitian penulisan hukum saya.
Subjek	Baik, apa yang ingin ditanyakan?
Peneliti	Jadi seperti ini pak, topik penelitian hukum saya adalah upaya pemerintah Korea Selatan dalam melindungi pengungsi Korea Utara berdasarkan prinsip non-diskriminasi. Kemudian, apakah ada bentuk diskriminasi terhadap pengungsi Korea Utara yang menetap di Korea Selatan?
Subjek	Betul, terdapat diskriminasi dari masyarakat Korea Selatan sehingga menyebabkan kesenjangan sosial. Hal ini disebabkan oleh logat dan bahasa bicara yang berbeda, misalnya ketika saya di Jakarta dapat terlihat logat bahwa saya ini orang Jawa. Begitu juga di Korea, walaupun pengungsi Korea Utara berbahasa korea juga namun

	terlihat perbedaan logatnya dengan masyarakat Korea Selatan.
Peneliti	Wah, menarik pak. Lalu, apakah pengungsi Korea Utara merasakan kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat Korea Selatan?
Subjek	Sebenarnya iya, pengungsi Korea Utara belajar cara menjadi bagian dari masyarakat Korea Selatan dan belajar cara " <i>fit in</i> " yang mana itu tidak mudah.
Peneliti	Apa yang membuat mereka sulit " <i>fit in</i> " pak?
Subjek	Mereka harus belajar banyak hal termasuk manajemen keuangan. Di Korea Selatan, perbedaan antara sosialisme dan kapitalisme cukup terasa bagi pengungsi Korea Utara sehingga menjadi tantangan bagi mereka.
Peneliti	Apakah ada perbedaan masyarakat Korea Selatan dan pengungsi Korea Utara?
Subjek	Iya, ada perbedaan. Pengungsi Korea Utara yang berusaha menjadi bagian masyarakat Korea Selatan harus melepaskan label bahwa mereka berasal dari utara agar terhindar dari stigma negatif masyarakat Korea Selatan.
Peneliti	Bagaimana pandangan masyarakat Korea Selatan terhadap pengungsi Korea Utara pak?
Subjek	Masih ada ketakutan terhadap komunisme terutama dikalangan generasi yang ikut perang saudara korea. Pandangan mereka masih konservatif dan masih memandang sebelah mata.
Peneliti	Apakah ada upaya dari pengungsi Korea Utara untuk menyembunyikan asal usul mereka?
Subjek	Betul, pengungsi Korea Utara berusaha keras untuk tidak terlihat berbeda agar bisa diterima masyarakat Korea Selatan.

Peneliti	Bagaimana dengan pandangan pengungsi Korea Utara terhadap masyarakat Korea Selatan?
Subjek	Mereka yang berasal dari Korea Utara tidak senang disebut sebagai orang Korea Selatan, mereka lebih senang dipanggil Joseon Utara karena sebutan Korea Selatan dianggap terlalu berlebihan.
Peneliti	Menarik sekali, pak. Lalu apakah ada dampaknya pak?
Subjek	Tentu ada dampaknya. Masyarakat Korea Selatan tidak senang dengan panggilan tersebut, banyak dari pengungsi Korea Utara memanggil mereka Joseon Selatan karena terlalu kuno.
Peneliti	Apakah ada upaya pemerintah dalam membantu integrasi pengungsi Korea Utara ke dalam masyarakat Korea Selatan?
Subjek	Dari pemerintah tentu saja ada, yaitu terdapat Kementerian Unifikasi tetapi masih menjadi tantangan bagi pemerintah Korea Selatan karena terdapat perbedaan latar belakang dan stigma negatif.
Peneliti	Baik, Pak Suray sudah cukup dari saya. Terima kasih banyak pak sudah membantu penelitian saya, berkah dalem pak.
Subjek	Sama – sama, mas. Semoga lancar skripsinya dan lulus tepat waktu.